



**P U T U S A N**

**Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Str**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Susi Yanti, S.Pd binti Tamar Djaya**, NIK 1117035809910001,  
Tempat Tanggal Lahir Bale Atu 18  
September 1991, agama Islam,  
pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer,  
tempat tinggal di Kampung Babussalam,  
Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener  
Meriah, Nomor Handphone  
082269816744, dalam hal ini  
menggunakan domisili elektronik  
dengan alamat email  
[susiyanti1891991@gmail.com](mailto:susiyanti1891991@gmail.com)  
selanjutnya disebut **Penggugat**;  
m e l a w a n

**Marwan, S.Pd bin Bantasyam**, Tempat Tanggal Lahir Bener  
Pepanyi 10 September 1988, agama  
Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru  
Honorer, tempat tinggal di Kampung  
Bener Pepanyi, Kecamatan Permata,  
Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya  
disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

-

Hal 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Str



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Str pada tanggal 10 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0114/018/V/2017 tanggal 16 Mei 2017;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Reje Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat di Kampung Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. Hafizh Alfarezi, lahir tanggal 22 April 2018 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 6 (enam) bulan saja sempat Penggugat karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tanggal 21 Oktober 2017 hingga saat ini;
  - b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
  - c. Tergugat malas beribadah;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 21 Oktober 2017 pada saat itu Penggugat sedang mengandung dan usia kandungan Penggugat masih 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat menginginkan untuk minum es campur namun

-

Hal 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Penggugat berbicara seperti itu Tergugat tidak peduli dan mengabaikan pembicaraan Penggugat sedangkan Penggugat sedang mengandung anak Tergugat kemudian Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang hingga larut malam sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat bahkan Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaan memancing sedangkan Penggugat sedang hamil dan membutuhkan perhatian dari Tergugat;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di Kampung Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Hafizh Alfarezi** umur 2 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat di Kampung Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah maka Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

-

Hal 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Marwan, S.Pd bin Bantasyam**) terhadap Penggugat (**Susi Yanti, S.Pd binti Tamar Djaya**);
3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Hafizh Alfarezi**, Lahir di Kute Lintang tanggal 22 April 2018;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Relaas Panggilan Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Str pada tanggal tanggal 14 Juli 2020 dan tanggal 23 Juli 2020 dan ternyata tidak menghadap/tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

-

Hal 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Str



Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susiyanti (Penggugat) NIK 1117035809910001 tanggal 01-10-2018 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Susiyanti (Tergugat) Nomor 1117031702180002 tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0114/018/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Asli surat Nomor 47/BBS//2020 tanggal 07 Juli 2020 Prihal Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Babussalam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hafizh Alfarezi (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 1117-LT-18102018-0028 tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);

**B. Bukti Saksi**

**1. Salawati binti Tamar Djaya**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kampung Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Susi Yanti binti Tamar Djaya karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Marwan bin Bantasyam sebagai suami Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2017;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Babussalam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Bener Pepanyi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke rumah sewa di Kampung Reje Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak. Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat melapor kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut laporan Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering membawa pisau jika hendak tidur sehingga Tergugat merasa terancam;

Hal 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Str





- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan oleh aparat kampung di rumah imam kampung namun tidak berhasil. Saksi sendiri hadir ketika Penggugat dan Tergugat didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lebih. Ketika itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Bener Pepanyi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah padahal ketika itu Penggugat sedang mengandung sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat bahkan waktu anak Penggugat dan Tergugat lahir sampai sekarang anak Penggugat dan Tergugat sudah berumur sekitar 2 (dua) tahun Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta Tergugat yang dapat Penggugat gunakan untuk biaya hidup;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat;
- Bahwa Penggugat selalu mengurus anaknya dengan baik dan Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum;

**2. Nuraini binti Tamar Djaya**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Susi Yanti binti Tamar Djaya karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Marwan bin Bantasyam

- Hal 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Str



sebagai suami Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2017;

- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Babussalam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Bener Pepanyi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke rumah sewa di Kampung Reje Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak. Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sekitar 6 (enam) bulan namun kemudian Penggugat melapor kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan oleh aparat kampung di rumah imam kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lebih. Ketika itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Bener Pepanyi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah padahal ketika itu Penggugat sedang mengandung sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat bahkan waktu anak Penggugat dan Tergugat lahir sampai sekarang anak Penggugat

Hal 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah berumur sekitar 2 (dua) tahun Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta Tergugat yang dapat Penggugat gunakan untuk biaya hidup;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat;
- Bahwa Penggugat selalu mengurus anaknya dengan baik dan Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan mohon Putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari *ineffisiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2017 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Gugat;

Hal 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan bahagia hanya 6 (enam) bulan saja kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tanggal 21 Oktober 2017 hingga saat ini, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan Tergugat malas beribadah sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 21 Oktober 2017, atas alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan dan mohon untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi dan asli yang telah diberi tanda P.1 - P.5;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susiyanti (Penggugat) NIK 1117035809910001 tanggal 01-10-2018 yang dikeluarkan di Bener Meriah yang telah diberi tanda P.1, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Susiyanti (Tergugat) Nomor 1117031702180002 tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi tanda P.2, fotokopi Kutipan Akta Nikah 0114/018/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai

- Hal 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi tanda P.3, asli surat Nomor 47/BBS//2020 tanggal 07 Juli 2020 Prihal Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Babussalam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang diberi tanda P.4, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hafizh Alfarezi (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 1117-LT-18102018-0028 tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi tanda P.5. Alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. dan P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh aparat kampung tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Hafizh Alfarezi;

-

Hal 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu **Salawati binti Tamar Djaya** dan **Nuraini binti Tamar Djaya**;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama **Salawati binti Tamar Djaya** dan saksi kedua **Nuraini binti Tamar Djaya**, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 15 Mei 2017;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Babussalam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan kadang-kadang tinggal

Hal 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Tergugat di Kampung Bener Pepanyi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke rumah sewa di Kampung Reje Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak. Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan oleh aparat kampung di rumah imam kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lebih. Ketika itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Bener Pepanyi Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah padahal ketika itu Penggugat sedang mengandung sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat bahkan waktu anak Penggugat dan Tergugat lahir sampai sekarang anak Penggugat dan Tergugat sudah berumur sekitar 2 (dua) tahun Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta Tergugat yang dapat Penggugat gunakan untuk biaya hidup;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat;
- Bahwa Penggugat selalu mengurus anaknya dengan baik dan Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2017 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Str





0114/018/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah tanggal 16 Mei 2017;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat serta Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum dan Penggugat selalu mengurus anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَجْلاَءَ لَكُمْ وَلَهُ عِلْمُ الْغُيُوبِ  
وَجَعَلَ لَكُمْ مَوَدَّةَ وَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

Hal 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Str



*rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami-istri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada menarik *maslahat*”.

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat hanya akan menimbulkan kerusakan baik psikologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, demikian juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan, bahwa sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, dengan demikian gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap anak yang bernama Hafizh Alfarezi bin Marwan, lahir tanggal 22 April 2018 ditetapkan di bawah asuhan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam karena anak tersebut belum mumayyiz dan dalam hal ini tidak juga ditemukan bahwa Penggugat mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak serta Tergugat juga tidak pernah hadir ke persidangan sehingga tidak dapat dimintai keterangannya, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat berarti tidak ada bantahan mengenai tuntutan Penggugat tersebut maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan sedangkan mengenai pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal memberi kasih sayang kepada Hafizh Alfarezi bin Marwan maka kepada Penggugat (Susi Yanti, S.Pd binti Tamar Djaya) untuk tidak membatasi akses komunikasi dan menghalangi hak Tergugat (Marwan, S.Pd bin Bantasyam) untuk menemui

Hal 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak selaku ayah kandungnya, maka bila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat selaku ayahnya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) dari Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Marwan, S.Pd bin Bantasyam**) terhadap Penggugat (**Susi Yanti, S.Pd binti Tamar Djaya**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Hafizh Alfarezi bin Marwan**, lahir tanggal 22 April 2018 berada di bawah hadhanah Penggugat (**Susi Yanti, S.Pd binti Tamar Djaya**) dengan tidak menghalangi hak akses dan komunikasi Tergugat (**Marwan, S.Pd bin Bantasyam**) untuk menemui anak tersebut;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

- Hal 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Selasa** tanggal **28 Juli 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **07 Dzulhijjah 1441 H**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I.**, dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**dto**

**dto**

**Nor Solichin, S.H.I.**

**Siti Salwa, S.H.I.**

**dto**

**Alimal Yusro Siregar, S.H.I.**

**Panitera**

**dto**

**Sukna, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp 500.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 516.000,00  
Terbilang (Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Hal 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Str